BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pringsewu sebagai sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Surat Keterangan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) nomor 48 Tahun 2008, juga tengah giat membangun daerahnya. Sebagai daerah yang masih agraris, struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh sektor pertanian dengan komoditas yang utama adalah padi sawah dan padi ladang, padi organik, jagung dan juga komoditas sayur mayur serta ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah dan juga kacang hijau.

Kabupaten Pringsewu memiliki ketersediaan lahan yang luas dan subur sehingga sangat potensial untuk pengembangan tanaman palawija seperti, tomat, cabe, sayur mayur dan tanaman palawija lainnya. Komoditas tanaman palawija ini, menjadi komoditas yang cukup handal yang pemasarannya tidak saja di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, tetapi telah merambah keluar Provinsi Lampung, seperti Jakarta dan Palembang.

Namun demikian sektor pertanian ini belum mampu sepenuhnya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Data statistik menunjukkan bahwa dari setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu masih banyak masyarakat miskin, fenomena ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel: 1

Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Pringsewu per Kecamatan Tahun 2011

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin(KK)	NO	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin(KK)
1.	Pardasuka	3.790	5.	Gadingrejo	6.289
2.	Ambarawa	2.388	6.	Sukoharjo	2.918
3.	Pagelaran	6.050	7.	Banyumas	1.598
4.	Pringsewu	4.736	8.	Adiluwih	2.731

(Sumber : RPJM Minapolitan Kabupaten Pringsewu, Tahun 2011)

Sektor utama mata pencaharian masyarakat Pringsewu dalam sektor pertanian tersebut terbukti belum dapat mengentaskan kemiskinan dan belum dapat mensejahterakan masyarakat Pringsewu karena di setiap kecamatan tingkat kemiskinan masih cukup tinggi dan jika di total sekitar 30.500 KK. Oleh karena itu ada sektor lain yang perlu dilirik untuk mensejahterakan kehidupan mereka.

Sementara itu untuk lapangan pekerjaan yang dominan lainnya selain sektor pertanian adalah perdagangan, industri dan jasa, hal ini dapat dilihat dari distribusi terhadap PDRB lapangan usaha yang terbesar masih didominasi sektor pertanian sebesar 34,16 persen.(*www.radarlampung.co.id*) diakses tanggal 15 Juni 2014)

Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu juga telah membuat kebijakan yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat Pringsewu serta menyediakan alternatif lapangan pekerjaan yaitu melalui kebijakan minapolitan. Pemerintah mengambil kebijakan Minapolitan karena potensi perikanan disana cukup potensial, selama ini masyarakat pringsewu khususnya kecamatan Pagelaran dan sekitarnya memang dikenal mempunyai mata pencaharian sebagai pembudidaya ikan air tawar. Hal ini ditunjang dengan data yang menunjukkan salah satu komoditas penting perikaan budidaya di Kabupaten Pringsewu adalah Ikan gurame, disamping komoditas lain seperti ikan lele, mas, nila, belut dan patin. Pada tahun 2011 pemanfaatan kolam untuk komoditas ikan Gurame adalah seluas 92,5 Ha dengan produksi sebesar 309,9 ton. Pemanfaatan kolam gurame tersebut menyebar di 4 (empat) kecamatan yakni, kecamatan Pagelaran, Pardasuka, Banyumas, dan Sukoharjo.(*www.pringsewu.go.id*) di akses 09 Juni 2014

Pengembangan komoditas ikan gurame di Kabupaten Pringsewu sangat menjanjikan hal ini disebabkan oleh karena selain kondisi daerah yang sangat mendukung juga disebabkan kegiatan budidaya ikan gurame memiliki nilai ekonomis yang tinggi disemua tahapan produksi. Hal ini tidak terlepas karena daerah pengembangan perikanan di Kabupaten Pringsewu di lintasi oleh sungai yang sangat membantu para pembudidaya untuk meningkatkan proses perawatan ikan tersebut.

Dalam proses mendorong percepatan pembangunan ekonomi perikanan pada wilayah potensial di Kabupaten Pringsewu, maka diperlukan suatu nilai atau konsep pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota.

Secara umum kegiatan ekonomi perikanan terutama di daerah pedesaan sulit berkembang karena keterbatasan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu kualitas sumber daya manusia di pedesaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya manusia di daerah perkotaan.

Masih dalam sumber yang sama, dalam proses pengembangan pembangunan ekonomi perikanan, pemerintah Kabupaten Pringsewu mengembangkan konsep minapolitan yang diharapkan dapat membuat pembangunan sektor perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.

Prinsip integrasi diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumber daya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik instansi sektoral, pemerintahan ditingkat pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya kebijakan Program Minapolitan ini masih belum optimal, Menurut Purwanto (masyarakat asli Pringsewu) masih banyak masyarakat yang hidup dengan penuh kekurangan dan yang belum mengetahui kebijakan tersebut serta tidak perduli dalam proses pelaksanaanya. (wawancara pra riset, tanggal 10 Januari 2014) Masalah minapolitan di Kabupaten Pringsewu cukup menarik untuk di kembangkan, karena sektor perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi wilayah yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pringsewu. Pengembangan sektor ini dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman karakteristik daerah dan pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Perikanan sebagai sektor ekonomi wilayah memiliki keterkaitan dengan tingkatan pembangunan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier, sehingga memiliki peranan penting dalam pembangunan masing-masing sektor ekonomi tersebut.

2. Sektor perikanan memiliki keterkaitan antar sektor, sehingga dapat menjadi pendorong bagi perkembangan sektor ekonomi lainnya.

3. Sektor perikanan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga dapat meminimalisir laju pertumbuhan pengangguran.

4. Pengembangan usaha bidang perikanan merupakan pertimbangan strategis non ekonomi, yang berperan dalam pengembangan sektor ekonomi kerakyatan dan mendukung aspek kenegaraan lainnya seperti pertanahan dan keamanan nasional. (www.Minapolitan.go.id), diakses 10 Juni 2014

Berdasarkan RPJM minapolitan di Kabupaten Pringsewu masih banyak terdapat masalah umum yang dihadapi oleh masyarakat Pringsewu dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga belum maksimal hasilnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : 1). Berkurangnya jumlah pembudidaya, 2) .Keterbatasan modal usaha, 3). Tingginya biaya produksi, 4). Kurangnya Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, 5). Belum memiliki unit produksi pengolahan, 6). Belum ada alternatif peningkatan nilai tambah (*added value*), 7). Kurangnya Kualitas SDM dan dukungan teknologi, 8). Rendahnya kualitas benih, 9).

Akses terhadap lembaga keuangan masih rendah. (Sumber : Profil dan RPJM Minapolitan Pagelaran Pringsewu Lampung Tahun 2011)

Dari berbagai masalah yang timbul dan kaitannya dengan kondisi serta teori dalam implementasi program minapolitan pada masyarakat Pringsewu, merupakan bukti bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari permasalahan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial bagi kebijakan publik karena untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena didalamnya terdapat faktor-faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan.

Implementasi dapat berjalan dengan efektif apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, mekanisme tersebut mencakup proses administratif, organisasi pelaksana, sampai pada pelaksanaan Program Minapolitan bagi masyarakat Pringsewu. Dalam mengkaji implementasi kebijakan dan mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan maka dapat diketahui bagaimana proses dari implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi kebijakan minapolitan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat

serta sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan program minapolitan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan program minapolitan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Memaparkan implementasi kebijakan dalam program minapolitan di Kabupaten Pringsewu.

b) Memaparkan kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan Minapolitan di Kabupaten Pringsewu.

2. Kegunaan Penelitian

a) Dilihat dari konteks pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan wawasan dalam ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik.

b) Dilihat dari sudut pandang praktis, penelitian ini mampu menjadi acuan serta referensi bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan pihak terkait dalam menentukan langkah-langkah suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

c) Sebagai salah satu bahan acuan untuk referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah serupa.